

Zaman Pergerakan, Pers, dan Nasionalisme di Indonesia *)

Oleh: Andi Suwirta

*Djadi djournalist djaman sekarang
Berani dihoekoem dan diboelang
Karena dia orang jang mesti menendang
Semoea barang jang malang melintang*

*Djournalist haroes berani mati
Bekerdja boeat membanting diri
Sebab dia hendak melindoengi
Fehak jang lemah dan diisap*

(Mas Marco Kartodikromo, 1913)¹

Pengantar

Awal abad ke-20 ditandai oleh adanya fenomena pertumbuhan gagasan dan gerakan nasionalisme di Indonesia. Sebab-sebab tumbuhnya kesadaran nasional yang bermuara pada perlunya kemajuan, kesejahteraan, dan kemerdekaan bangsa itu dapat dilacak pada banyak faktor. Tanpa disadari, misalnya, bahwa proses penaklukan dan pendudukan Belanda atas wilayah Indonesia yang luas, yang semula masyarakatnya tercerai-berai itu, mendorong terbentuknya “sebuah komunitas politik yang dibayangkan” (*an imagined political community*), yang dalam perkembangan selanjutnya menuju ke arah proses pencarian identitas dan integrasi nasional (Anderson, 1990:15). Usaha penaklukan dan pendudukan yang hampir sempurna pada awal abad ke-20 dengan *Pax Neerlandica*-nya, juga telah melahirkan kesadaran akan perbedaan dua entitas bangsa, yaitu mereka yang “terperintah” dengan yang “memerintah”.

*)Tulisan ini, sebelum diubahsuai seperti dalam bentuknya sekarang, pernah dimuat di jurnal *Mimbar Pendidikan*, No.4 (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 1999).

¹Sebagaimana dikutip oleh Mohamad (1993).

Sementara itu kebijakan Politik Etis (*Etische Politiek*) yang diperkenalkan pemerintah Belanda pada tahun 1901 telah mendorong terbentuknya kelompok sosial baru yang dikenal dengan sebutan golongan elite modern atau Priyayi Baru (Van Niel, 1984; dan Frederick, 1989:43). Golongan ini, karena status sosial dan tingkat pendidikannya, di satu sisi tetap mewarisi beberapa perangkat kebudayaan elite tradisional, namun di sisi lain memiliki pandangan, nilai, dan cita-cita baru dalam mensikapi realitas dan perubahan sosial yang mengitarinya. Adapun cita-cita yang dimaksud adalah perlunya mengimplementasikan gagasan “*kemadjoean*”. Dan untuk dapat mencapai kemajuan itu maka proses penyadaran dan usaha pendidikan yang bersifat massal menjadi keniscayaan.

Golongan elite modern ini pula yang kemudian menjadi agen pembaharuan dan pelopor dari gerakan nasional. Dalam memperjuangkan cita-cita nasionalnya itu digunakan *modus operandi* baru dengan membentuk organisasi dan pers sebagai salah satu media komunikasi modern. Memang, sebagaimana sering dikatakan, antara organisasi pergerakan nasional dan pers merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Yang satu kehadirannya, secara organik dan komplementer, membutuhkan yang lain (Kartodirdjo, 1993:113-14).

Medan Prijaji: Pers Bumiputera Pertama

Kelahiran pers bumiputera, yaitu pers yang dikelola, dimodali, dan dimiliki oleh orang Indonesia sendiri, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perkembangan pers yang dikelola oleh orang-orang Belanda dan Cina di Indonesia (Hoogerwerf, 1990:141). Pada akhir abad 19 dan awal abad 20 orang-orang Belanda dan Cina itu telah menerbitkan dan memanfaatkan pers sebagai media yang efektif untuk membela kepentingan politik dan sosial mereka. Keadaan seperti itu kemudian disadari juga oleh golongan elite modern Indonesia untuk menerbitkan pers sebagai media untuk mensosialisasikan gagasan, cita-cita, dan kepentingan politik mereka, terutama dalam memajukan penduduk bumiputera di Indonesia.

Salah seorang dari elite terdidik yang sadar akan hal itu adalah Raden Mas Djokomono alias Raden Mas Tirta Adhi Soerjo, seorang keturunan priyayi dan bekas pelajar STOVIA. Pada tahun 1906 ia memprakarsai didirikannya Sarekat Priyayi yang salah satu tujuannya adalah untuk memajukan penduduk bumiputera dengan cara memberikan pendidikan dan beasiswa kepada mereka yang kurang mampu. Dan agar terjadi komunikasi diantara anggota sarekat itu,

maka pada tahun 1907 ia menerbitkan surat kabar *Medan Prijaji* di Bandung, yang dianggap sebagai pers pribumi pertama di Indonesia.²

Ketika masih sebagai mingguan, *Medan Prijaji* menetapkan motto: “SOEARA bagai sekalian Radja-radja asali dan fikiran, Prijaji dan saudagar² Boemipoetra dan officier-officier serta saudagar-saudagar dari bangsa jang terprentah laennja jang dipersamakan dengan Anaknegri, di seloeroeh Hindia Olanda”.³ Dari motto yang digunakan menjadi jelas bahwa surat kabar ini merupakan medan atau lapangan perjuangan bagi golongan “priyayi” (bangsawan), “saudagar” (pedagang), dan “officier” (pejabat) untuk bersama-sama memajukan penduduk bumiputera yang tertinggal bila dibandingkan dengan masyarakat Tionghoa, apalagi dengan masyarakat Belanda, di Indonesia. Adapun sebutan “asali” dan “fikiran” bagi golongan “raja-raja” itu, hanya untuk menunjukkan bahwa status golongan yang pertama didasarkan atas asal-usul keturunan, sedangkan yang kedua berdasarkan atas pendidikan.

Pada tahun 1910 *Medan Prijaji* berubah menjadi harian, dengan mengambil motto: “Orgaan boeat bangsa jang terprentah di H.O.. Tempat akan memboeka swaranja Anak Hindia” (Tjokrosisworo ed., 1958:143). Dalam konteks zamannya, motto yang digunakan *Medan Prijaji* itu – baik pada waktu masih sebagai mingguan maupun harian – sudah dianggap radikal bila dibandingkan dengan surat kabar *Sinar Soematera* di Padang, misalnya, yang masih menggunakan motto: “Kekallah keradjaan Wolanda, sampai mati setia kepada keradjaan Wolanda” (Soebagijo I.N., 1977:16). Bentuk dan isi pemberitaan *Medan Prijaji* juga modern, terutama dalam penempatan artikel karangan dan iklan, bila dibandingkan dengan surat kabar sezaman yang berisi pengumuman dan cerita dongengan. Oplah surat kabar *Medan Prijaji* mencapai 2.000 eksemplar, suatu jumlah yang juga besar pada zamannya (Toer, 1985:66).

Melalui *Medan Prijaji* Tirta Adhi Soerjo menginginkan bangsa H.O. (Hindia Olanda atau Indonesia sekarang) maju dan mengejar ketinggalan dari bangsa-bangsa lain. Ia sendiri memuji kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat Cina di Indonesia pada awal abad 20 ini, karena – selain pengaruh pendidikan – juga pentingnya

²Sebenarnya sebelum menerbitkan *Medan Prijaji*, Tirta Adhi Soerjo sudah menerbitkan surat kabar *Soenda Berita* di Cianjur, Jawa Barat, pada tahun 1903 yang juga dapat dianggap sebagai pers bumiputera pertama di Indonesia. Selanjutnya lihat Djunaedi (1988:11).

³Lihat *Medan Prijaji*, No.13, 2 April 1910, sebagaimana dimuat dalam Toer (1985:47).

penggunaan surat kabar. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa lain, seperti Cina, Jepang, India, dan Turki diberitakan oleh surat kabar ini. Dan yang menarik bahwa dalam menyajikan berita-beritanya itu, surat kabar *Medan Prijaji* lebih senang menggunakan bahasa Melayu-rendahan atau Melayu-pasaran. Menurut Tirto Adhi Soerjo alasan menggunakan bahasa Melayu-rendahan itu adalah karena selain dianggap demokratis, bahasa ini juga diyakini “... *bakal kalahken dan moesnahken sama sekali bahasa Melajoe-(tinggi)-Riouw atawa Melajoe Ophuijsen jang sekarang masih dilindoengken oleh Government*” (Salmon, 1983:109-110).

Sementara itu cita-cita Tirto Adhi Soerjo untuk memajukan bangsa Hindia di satu sisi dan ingin melindungi rakyat kecil dari tindakan sewenang-wenang pejabat kolonial Belanda di sisi lain, telah mendorong dirinya untuk menerbitkan surat kabar lainnya seperti: *Soeloeh Keadilan*, *Poetri Hindia*, *Pantjaran Warta*, *Soeara S.S.* (Staats Spoorwegen), *Soeara B.O.W.* (Burgerlijke Openbare Werken), dan *Soeara Pegadaian* (Adam, 1995:171-177). Semua surat kabar itu, dilihat dari nama dan isinya, mencerminkan cita-cita dan keyakinan Tirto Adhi Soerjo bahwa “... dengan bekerja sebagai redaktur koran, saya bisa menggerakkan hati bangsa dan mengubah mereka yang masih tidur nyenyak agar mulai menyadari kewajibannya” (Toer, 1985:397). Tidak cukup dengan mendirikan surat kabar, ia juga bersama-sama dengan Haji Samanhoedi mendirikan SDI (Sarekat Dagang Islam) pada tahun 1911 di Solo, dengan tujuan utama untuk memajukan kepentingan ekonomi umat Islam di Hindia Belanda.

Karena tulisannya di surat kabar banyak mengkritik dan membeberkan kesewenang-wenangan pejabat pemerintah, maka Tirto Adhi Soerjo dihukum dan dibuang. Mula-mula ia dibuang ke Lampung pada tahun 1909. Setelah bebas dan tulisan-tulisannya dalam surat kabar tidak berubah, ia kemudian dibuang ke Maluku pada tahun 1912. Pembuangannya yang terakhir ini menyebabkan surat kabar dan usaha bisnis yang telah dilakukan, mengalami kemunduran. Ia sendiri kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia pada tahun 1916, dalam usia yang masih muda, 38 tahun. Mengingat perjuangannya itu tidaklah mengherankan kalau Tirto Adhi Soerjo, kemudian, dianggap sebagai “... *penggontjang Boemipoetra bangoen dari tidoernja*”, “perintis persuratkabaran dan kewartawanan nasional”, “nestor dari *journalisten*”, dan sebagainya (Toer, 1985:289).

Pers: Suara dan Senjata Golongan Nasionalis

Semakin bertambahnya golongan elite modern yang terdidik, semakin tumbuh pula kesadaran pada mereka akan perlunya kemajuan dan kesejahteraan bagi penduduk bumiputera. Kesadaran itu kemudian diwujudkan dengan membentuk organisasi pergerakan, dengan pers sebagai sarana untuk mengkomunikasikan gagasan, cita-cita, dan program selain – tentu saja – melalui rapat, pertemuan, diskusi, perdebatan, dan kongres. Maka dalam dasawarsa pertama abad 20 kita menyaksikan berdirinya berbagai macam organisasi pergerakan, baik yang bersifat sosio-kebudayaan, keagamaan, maupun politik di Indonesia. Dan pers pun terbit dengan suburnya sebagai “corong” dari organisasi-organisasi pergerakan itu.

Begitulah, misalnya, organisasi Budi Utomo (1908) memiliki beberapa surat kabar seperti: *Retnodhoemilah*, *Darmokondo*, dan *Goeroe Desa*. Sarekat Islam (1912) memiliki surat kabar: *Oetoesan Hindia*, *Kaoem Moeda*, *Pantjaran Warta*, *Sinar Djawa*, *Medan Moeslimin*, dan *Sarotomo*. Indische Partij (1912) memiliki surat kabar: *De Expres*, *Het Tijdschrift*, *Tjahaja Timoer*, dan *Persatoean Hindia*. Dan Muhammadiyah (1912) memiliki surat kabar: *Pandji Islam*, *Penaboer*, dan *Adil* (Adam, 1995:108-124). Pemilihan nama-nama surat kabar itu selain mencerminkan pandangan, cita-cita, dan pendirian para pengelolanya (redaktur) juga disesuaikan dengan semangat zamannya.

Betapun setiap organisasi pergerakan memiliki cita-cita dan tujuan yang sama – sebagaimana tercermin dalam isi persnya – yaitu tentang perlunya kemajuan, kesejahteraan, dan akhirnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, namun dalam hal bagaimana bentuk dan cara-cara perjuangan yang akan digunakan untuk mewujudkan cita-cita itu, nampaknya, tiap-tiap organisasi memiliki pandangan yang berbeda. Begitu juga dalam memperbincangkan konstruksi masyarakat Indonesia di masa depan, terutama bila dihubungkan dengan peradaban Barat, pandangan para tokoh pergerakan nasional itu berbeda-beda. Ada yang menghendaki berpaling ke Barat (seperti Tjipto Mangoenkoesoemo dan Sutan Takdir Alisjahbana), kembali ke kebudayaan Timur (seperti Soewardi Soerjaningrat dan Sanoesi Pane), dan ada juga yang menghendaki jalan tengah atau sintesa dari keduanya (seperti Soetomo dan Adinegoro). Perbincangan seperti itu terus berlanjut sampai tahun 1930-an dan getaran pengaruhnya, bagaimanapun, masih dirasakan sampai sekarang (Scherer, 1985; dan Mihardja ed., 1986).

Sementara itu memasuki dasawarsa kedua abad 20 gejala radikalisme mulai melanda gerakan nasional di Indonesia. Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, misalnya, telah memberikan arti politis pada kata “Indonesia” yang sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan “Hindia Belanda” atau “Hindia Olanda”, dan menetapkan tujuan organisasi itu secara tegas – seperti nama majalahnya – *Indonesia Merdeka* (Ingleson, 1993:7-11). Begitu juga dengan keadaan organisasi di dalam negeri mulai mengalami proses radikalisasi. Organisasi Sarekat Islam (SI) Cabang Semarang, misalnya, menggugat otoritas kepemimpinan SI Pusat di Surabaya yang dinilai moderat, lamban, dan tidak tegas dalam memperjuangkan cita-cita kemajuan, kesejahteraan, dan kemerdekaan masyarakat Indonesia.

Puncak dari radikalisme itu terjadi pada tahun 1926 ketika organisasi PKI melakukan pemberontakan di Jawa dan sebagian di Sumatera. Namun pemberontakan itu segera ditumpas dengan keras oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan akibat dari pemberontakan yang abortif itu banyak tokoh pergerakan dan tokoh pers – baik yang terlibat maupun tidak – ditangkapi, dipenjarakan, dan dibuang. Hal itu membawa dampak yang sangat mencolok bagi kehidupan pers di Indonesia, yaitu bahwa dalam perkembangan selanjutnya banyak surat kabar yang orientasi tujuan dan isi pemberitaannya tidak lagi bersifat politik dan radikal, melainkan netral dan moderat.

Melihat keadaan kehidupan pers yang demikian, M. Tabrani, seorang wartawan terkenal dan lulusan Institut Jurnalistik Jerman, melakukan semacam refleksi pemikiran. Pemikirannya itu kemudian dituangkan dalam bentuk brosur dengan judul *Ons Wapen* (Senjata Kita). Dalam brosur yang ditulis pada tahun 1929 itu ingin ditandaskan kembali bahwa pers, bagaimanapun, merupakan “senjata kita” untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tugas pers yang utama adalah membangkitkan kesadaran politik, mendidik masyarakat, dan mengangkat derajat bangsa dari dunia gelap ke dunia terang. Karena itu M. Tabrani mengecam adanya pers yang bersifat “netral” karena kenetralan itu pada gilirannya adalah seteril dari kepentingan dan tujuan politik. Tetapi pada sisi lain ia juga menyadari bahwa keadaan pers Indonesia memang sangat memprihatinkan bila dibandingkan dengan pers milik orang-orang Cina apalagi Belanda. Kualitas percetakan yang rendah, pemasangan iklan yang minim, modal yang kurang, tenaga redaksi yang tidak profesional, serta daya jangkauan dan lingkungan pembaca yang terbatas itu, menurut M.

Tabrani, merupakan kendala-kendala utama bagi pers nasional pada waktu itu (Gani, 1978:44-80).

Refleksi pemikiran dan harapan yang diajukan oleh M. Tabrani itu nampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap kehidupan pers Indonesia pada tahun 1930-an. Menurut data-data yang ada dari 33 pers pribumi yang terbit pada tahun 1930-an itu, sebanyak 20 surat kabar orientasi pemberitaannya cenderung bersifat netral dan moderat. Sedangkan 13 surat kabar sisanya mengambil sikap politik kooperatif, sesuai dengan kebijakan induk organisasinya, kepada pemerintah kolonial Belanda. Oplah surat kabar pun tidak mengalami kemajuan yang berarti, yaitu sekitar 1.000-2.500 eksemplar setiap harinya (Surjomihardjo ed., 1980:83-84).

Nampaknya beberapa sebab, mengapa keadaan pers khususnya dan kehidupan pergerakan nasional umumnya mengalami kemunduran pada tahun 1930-an, dapat dilacak pada tiga hal. *Pertama*, tindakan pemerintah Belanda setelah pemberontakan PKI tahun 1926 yang gagal itu semakin represif dan otoriter. Isi berita atau tulisan dalam pers yang dianggap menyebarkan kebencian, permusuhan, serta mengganggu keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) dapat ditutup atau dihentikan penerbitannya oleh Gubernur Jendral Belanda sesuai dengan diberlakukannya Undang-undang Pembreidelan Pers (*Persbreidel Ordonnantie*) pada tahun 1931. Karena itu maka surat kabar seperti *Fikiran Rakjat* milik PNI (Partai Nasional Indonesia) dan *Daulat Rakjat* milik PNI-Baru (Pendidikan Nasional Indonesia) yang masih bersifat politis, kritis, dan tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Belanda, mulai ditekan. Tokoh-tokohnya, yang juga adalah tokoh pers, seperti Soekarno, Mohamad Hatta, dan Sutan Sjahrir juga ditangkap, dihukum, dan dibuang (Ingleson, 1983:245-251).

Kedua, untuk menetralsir pengaruh politik dari pers Indonesia, pemerintah kolonial Belanda memberikan subsidi kepada pers yang bersifat netral dan moderat, serta memajukan Balai Pustaka. Badan terakhir itu sejak didirikannya pada tahun 1908 memang ditugasi untuk menyediakan bacaan bagi rakyat agar mereka menjadi warga negara yang baik dalam lingkungan politik kerajaan Belanda (Setiadi, 1991:23-46). Dan *ketiga*, pemerintah kolonial Belanda terus mendorong kedudukan dan peran ANETA (*Algemeen Nieuws en Telegraaf Agentschap*) sebagai badan yang menyediakan sumber berita penting bagi pers, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Walaupun pada tahun 1937 golongan nasionalis mendirikan ANTARA, sebagai tandingan terhadap ANETA, namun

kantor berita itu menurut pengakuan salah seorang pemrakarsanya, "... dalam masa-masa yang sulit di waktu permulaan pertumbuhannya" (Malik, 1982:202).

Dari gambaran di atas menjadi jelas bahwa keadaan pers Indonesia pada tahun 1930-an mengalami hambatan yang serius. Adanya idealisme dan cita-cita yang tinggi untuk menjadikan pers sebagai alat perjuangan mencapai kemerdekaan nasional adalah satu hal. Sedangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, baik kondisi internal maupun tekanan eksternal, adalah hal lain lagi. Pemerintah kolonial Belanda sendiri selalu memandang rendah dan mengejek pers Indonesia dengan para pengelolanya itu sebagai "*djoernalis setalenan*". Istilah itu digunakan untuk menunjuk pada kenyataan bahwa pers bumiputera bukan saja kualitasnya rendah, harganya murah (hanya sepertiga dari pers Belanda), tetapi juga jangkauan pembacanya terbatas karena – salah satunya – menggunakan bahasa Melayu-rendahan.

Dari Jurnalis Setalenan ke Jurnalis Sungguhan

Masuknya Jepang ke Indonesia dan dapat mengalahkan Belanda dalam waktu singkat, mencengangkan hampir semua orang. Pemerintah Belanda yang dianggap begitu kuat pada tahun 1930-an itu ternyata tidak berdaya dan membiarkan negeri Indonesia diduduki oleh "orang-orang kate dari Utara". Reaksi pertama bangsa Indonesia atas kejadian itu adalah hilangnya penghargaan dan rasa hormat kepada Belanda untuk selama-lamanya (Bijkerk, 1988:382). Sedangkan para tokoh pergerakan dan pers tidak melihat cara lain dalam menghadapi kerasnya pemerintah militer Jepang, selain berkolaborasi sambil tetap, sedapat mungkin, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sebagai penguasa baru pemerintah militer Jepang segera melakukan konsolidasi kekuasaan. Terhadap pers, misalnya, ditetapkan bahwa institusi sosial ini tidak lebih dari sebuah "*... instrument of his Government, to support and advance policies which aimed at winning the war and creating a Greater East Co-Prosperity Sphere*" (Lie, 1971:21). Karena itu pemerintah militer Jepang segera mengeluarkan *Osamu Seirei* (Undang-undang Pemerintah) No.16 untuk mengatur tentang kehidupan pers. Dengan adanya undang-undang itu maka praktis hampir semua pers yang terbit pada zaman Belanda ditutup. Pemerintah militer Jepang di Jawa, misalnya, kemudian hanya mengizinkan terbitnya beberapa surat kabar di kota-kota penting di Jawa seperti: *Asia Raya* di Jakarta, *Tjahaja* di

Bandung, *Sinar Baroe* di Semarang, *Sinar Matahari* di Yogyakarta, dan *Soeara Asia* di Surabaya. Semua surat kabar itu dihimpun dalam *Jawa Shimbun Kai* (Gabungan Persuratkabaran Jawa) yang diawasi sepenuhnya oleh *Sendenbu* (Barisan Propaganda) Jepang (Buwana, 1987; dan Latief, 1980).

Hidup di zaman Jepang, tentu saja, ditandai oleh tingkat kesengsaraan, penekanan, dan penindasan yang luar biasa. Dan pers nampaknya tidak dapat menyajikan berita-berita yang menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia yang sebenarnya pada waktu itu. Hal itu bukan saja disebabkan adanya sensor yang keras dari pemerintah militer Jepang, tetapi juga takut menghadapi resiko dihukum berat bagi siapa saja yang memberitakan hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan pihak penguasa. Gambaran yang hidup tentang keadaan masyarakat Indonesia pada zaman Jepang, khususnya di Jawa, justru muncul dalam karya-karya sastra (Idrus, 1993:77-112; dan Toer, 1995).

Walaupun kebebasan tidak ada, bila dibandingkan dengan kehidupan pers pada zaman Belanda sekalipun, namun ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh bangsa Indonesia dari pengalaman hidupnya yang keras pada zaman Jepang. Misalnya untuk pertama kali bangsa Indonesia, khususnya bagi para tokoh pergerakan dan pers, diperkenalkan dengan cara-cara propaganda dan mobilisasi massa yang efektif melalui berbagai media untuk menggalang kekuatan rakyat di satu sisi serta menghancurkan dan melemahkan semangat musuh di sisi lain (Kurasawa, 1993:229-386). Tidak terkecuali dengan pers. Berita-berita yang sifatnya bombastis seperti: *Kita menang di berbagai medan pertemporan; Sehidoeq semati bersama saudara toea; Petjah sebagai ratna; Inggris kita linggis Amerika kita seterika; Kita menggembleng tenaga oentoek mewedjoedkan kemenangan achir*; dan sebagainya menghiasi halaman-halaman surat kabar pada zaman Jepang setiap hari. Nampaknya yang diutamakan bukanlah “kebenaran” berita itu sendiri, melainkan “keharusan” memberitakan hal-hal yang menguntungkan bagi kepentingan penguasa.

Sementara itu dengan dilarangnya menggunakan bahasa Belanda – karena dianggap sebagai bahasa musuh – maka bahasa Indonesia menjadi semakin penting kedudukan dan peranannya sebagai bahasa nasional. Demikian juga halnya dengan pers. Tiadanya surat kabar Belanda telah memungkinkan pers Indonesia yang pada tahun 1930-an diejek sebagai surat kabar “setalenan” berubah menjadi surat kabar yang sesungguhnya pada zaman Jepang. Masalah gedung percetakan, persediaan kertas, tinta dan peralatan pers lainnya tidak lagi menjadi

persoalan. Pemerintah Jepang bisa dengan seenaknya merampas gedung percetakan Belanda atau Cina sebagai “Milik Balatentara” dan mengerahkan orang-orang Indonesia sebagai tenaga kerjanya.

Pemerintah militer Jepang juga memberikan kesempatan kepada berbagai golongan masyarakat, termasuk orang-orang pers, untuk mengikuti latihan kemiliteran dan memegang beberapa jabatan penting dalam birokrasi pemerintahan (Benda, 1980). Dengan demikian telah terjadi perubahan sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Perubahan-perubahan itu pada gilirannya juga turut mendorong terbentuknya jiwa patriotik dan semangat nasionalisme yang kuat, betapapun berada dalam kehidupan yang serba kurang. Dan ketika Jepang kalah perang maka bangsa Indonesia, termasuk jajarannya, telah siap untuk melaksanakan dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan yang dicita-citakannya itu.

Akhirul Kalam: Refleksi Kekinian

Pers Indonesia, dalam perspektif sejarah, sejak kelahirannya adalah *pers perjuangan*. Sebutan itu menunjukkan bahwa pers sebagai institusi sosial telah dijadikan senjata oleh golongan nasionalis Indonesia untuk memajukan, mensejahterakan, dan memerdekakan bangsanya di satu sisi, serta menentang segala bentuk kesewenang-wenangan penguasa yang represif dan otoriter di sisi lain. Cita-cita, gagasan, dan harapan yang tidak pernah hilang dari kesadaran yang sudah menyejarah itu acapkali mengilhami para pekerja pers sekarang untuk terus memelihara, mewarisi, dan mengaktualisasikan idealisme dan etika pers perjuangan itu.

Dari perspektif sejarah pula kita dapat membandingkan bahwa pers Indonesia sekarang, tentu saja, bukan lagi merupakan pers “setalenan” seperti pada zaman kolonial Belanda atau pers “propaganda” seperti pada zaman pendudukan Jepang. Melainkan pers yang bebas dan bertanggung jawab dengan keyakinan dan jati diri yang besar, serta telah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu menjadi sangat relevan – dalam konteks kehidupan dan kebebasan pers sekarang – apabila kita melakukan renungan yang bersifat kritis paling tidak dalam dua hal. *Pertama*, adalah merupakan absurditas sejarah *kalau* pers yang telah turut berjuang – dengan resiko dihukum dan dibuang – untuk memajukan, mensejahterakan, dan memerdekakan bangsa Indonesia dalam kenyataan selanjutnya menjadi terpasung jati diri dan kebebasannya. Dan *kedua*, juga merupakan ironi sejarah *seandainya* para jurnalis yang dulu mencita-citakan “dimana ada

kebebasan maka disitulah negeriku” lalu negeri yang telah dibayangkan (*imagined*), diperjuangkan dan ditegakkan keberadaannya itu tidak memberi kebebasan kepada institusi sosial “pengawal pendapat umum” ini yang justru tetap mendambakan negeri tercintanya itu: maju, sejahtera, dan merdeka dalam pengertian seluas-luasnya.

Daftar Pustaka

- Adam, Ahmat. (1995). *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness, 1855-1913*. New York, Ithaca: Cornell University.
- Anderson, Benedict R.O'G.. (1990). *Imagined Community, Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. London and New York: Verso.
- Benda, Harry J.. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bijkerk, J.C.. (1988). *Selamat Berpisah sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik (Dokumenter Runtuhnya Hindia Belanda)*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Buwana, Eka Putra. (1987). “Djawa Shinbun Kai: Kehidupan Persuratkabaran di Jawa pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945”. *Skripsi Sarjana*. Jakarta: Jurusan Sejarah FS-UI.
- Djunaidi, Mahbub. (1988). “Bermula dari Cianjur” dalam majalah *Tempo*. Jakarta: 4 Juni.
- Frederick, William H.. (1989). *Pandangan dan Gejala, Masyarakat Surabaya dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Gani, M.. (1978). *Surat Kabar Indonesia pada Tiga Zaman*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Hoogerwerf, Evert-Jan. (1990). *Persgeschiedenis van Indonesie tot 1942, Geannoteerde Bibliografie*. Leiden: KITLV Uitgeverij.
- Idrus. (1993). *Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ingleson, John. (1983). *Jalan ke Pengasingan: Gerakan Nasionalis Indonesia 1927-1934*. Jakarta: LP3ES.

- Ingleson, John. (1993). *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Nasional*. Jakarta: PT Grafiti Pers.
- Katodirdjo, Sartono. (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kurasawa, Aiko. (1993). *Mobilisasi dan Kontrol, Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lie, Oey Hong. (1971). *Indonesian Government and Press during Guided Democracy*. England: The University of Hull.
- Malik, Adam. (1982). *Mengabdikan Republik, Jilid I*. Jakarta: Gunung Agung.
- Mihardja, Achdiat K. [ed.]. (1986). *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Mohamad, Goenawan. (1993). "Tentang Modal dan Kebebasan Editorial". *Makalah*. Jakarta: Lembaga Pendidikan Pers Dr. Soetomo, 28 Oktober.
- Salmon, Claudine. (1983). "Apakah dari Sudut Linguistik Istilah Bahasa Melayu-Tionghoa Dapat Diterima?" dalam *Citra Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Scherer, Savitri P.. (1985). *Keselaras dan Kejanggalan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Setiadi, Hilmar Farid. (1991). "Kolonialisme dan Budaya, Balai Pustaka dan Hindia Belanda" dalam *Prisma*, No.10 (Oktober). Jakarta: LP3ES.
- Soebagijo I.N.. (1977). *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Surjomihardjo, Abdurrachman [ed.]. (1980). *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Leknas LIPI – Deppen RI.
- Tjokrosisworo, Soedarjo [ed.]. (1958). *Kenangan Sekilas Perjuangan Surat Kabar*. Djakarta: S.P.S..
- Toer, Pramoedya A.. (1985). *Sang Pemula*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, Pramoedya A.. (1995). *Perburuan*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Van Niel, Robert. (1984). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.